

Analisa Kajian Risiko Bencana Alam dan Keterkaitan Kebijakan Pemerintah serta Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Kegiatan Mitigasi Bencana di Kabupaten Cirebon

Deni Yulianto ¹⁾, Engga Setia Wijaya²⁾

^{1,2)} Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang

¹⁾Email: deniyulianto378@gmail.com , ²⁾Email : engga.wijaya@gmail.com

Abstrak – Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang terletak di pesisir laut Jawa yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan pada tahun 2020 memiliki nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) 160.63 yang termasuk kedalam kelas risiko tinggi. Kajian Risiko Bencana Tahun 2017 menunjukkan hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya dari 9 (sembilan) jenis potensi bencana di Kabupaten Cirebon berada pada kelas tinggi hingga rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan longsor. Bencana dengan kelas bahaya sedang yaitu gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan, sedangkan untuk gempa bumi dan letusan gunung api berada pada kelas bahaya rendah. Dalam rentang tahun 2017 – 2020 sudah terjadi total 2.358 kejadian bencana yang berdampak pada 94.510 jiwa (tahun 2017), 222.937 jiwa (tahun 2018), 207.045 jiwa (tahun 2019) dan 84.140 jiwa (tahun 2020) dengan jumlah total 7 korban jiwa meninggal selama kurun waktu tersebut. Kejadian bencana tersebut juga berdampak pada rusaknya bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Cirebon. Melihat begitu besarnya risiko bencana yang ada di Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya peran dari Pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kajian ini bertujuan untuk memetakan keterkaitan peran Pemerintah dan masyarakat pada kegiatan mitigasi bencana dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada data-data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan peran strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya mitigasi bencana sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 – tahun 2020 sedangkan untuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya siaga bencana masih ada pada kategori rendah dan perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Risiko, Bencana, Kebijakan, Kesiapsiagaan

PENDAHULUAN

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi (Wardyaningrum, 2014). Bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di pesisir laut Jawa yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan menurut tabel nilai indeks risiko bencana Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2020, Kabupaten Cirebon menempati urutan ke-9 dengan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2020 sebesar 160.63 yang termasuk kedalam kelas risiko tinggi (RENSTRA Kabupaten Cirebon, 2021).

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana pada tahun 2017, diketahui Kabupaten Cirebon memiliki 9 (sembilan) jenis potensi ancaman bencana. 9 (sembilan) potensi ancaman tersebut diantaranya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi dan letusan gunung api. Kajian Risiko Bencana tahun 2017 menunjukkan hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya dari 9 (sembilan) jenis potensi di Kabupaten Cirebon berada pada kelas tinggi hingga rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Bencana dengan kelas bahaya sedang yaitu gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan, sedangkan untuk gempa bumi dan letusan gunung api berada pada kelas bahaya rendah. Dalam rentang tahun 2017 -2020 berdasarkan infografis kejadian bencana Kabupaten Cirebon, sudah terjadi total 2.358 kejadian bencana yang berdampak pada 94.510 jiwa (tahun 2017), 222.937 jiwa (tahun 2018), 207.045 jiwa (tahun 2019) dan 84.140 jiwa (tahun 2020) dengan jumlah total 7 korban jiwa meninggal dunia dalam kurun waktu



tersebut (RENSTRA Kabupaten Cirebon, 2021). Kejadian bencana tersebut juga berdampak pada rusaknya bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Cirebon.

Melihat begitu besarnya risiko bencana yang ada di Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya peran pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia N0. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwasannya penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan bencana yang baik juga perlu adanya kerjasama antara aspek pemerintah setempat dan juga masyarakat agar meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan menjadikan masyarakat tersebut lebih sadar akan bencana dan dapat mengembangkan proses pembangunan (Marfuah dkk, 2021).

Penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon diselaraskan dengan kebijakan nasional penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan melihat ketercapaian program nasional dan daerah. Penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan gambaran tantangan dan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon sehingga didapatkan tindakan-tindakan efektif untuk penanggulangan bencana daerah kedepannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara risiko bencana yang ada di Kabupaten Cirebon dengan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan Kesiapsiagaan Masyarakat.

METODE

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengancara memahami dan mempelajari teori-teori data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif, bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proporsi dan gagasan. Jawaban dari penelitian ini akan dideskripsikan berdasarkan data yang didapatpada saat analisis data. Data sekunder yang digunakan berupa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

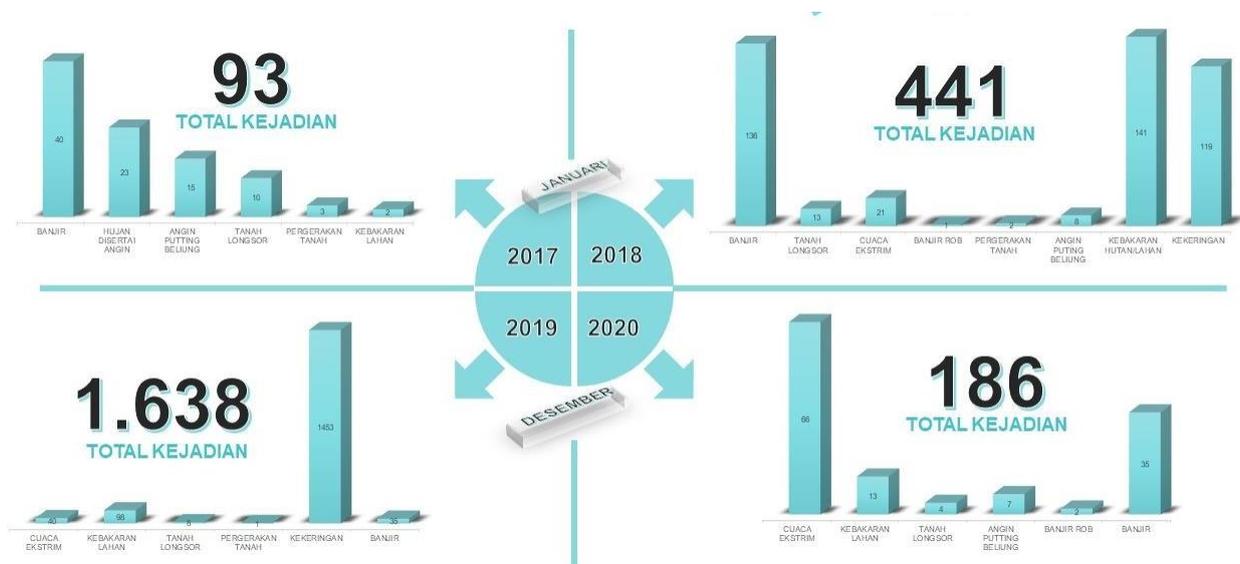
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Cirebon

Jenis Bahaya	Total Luas (ha)	Bahaya	Kelas
Banjir	71.638		Tinggi
Banjir Bandang	3.623		Tinggi
Cuaca Ekstrim	94.165		Tinggi

Gelombang Ekstrim dan Abrasi	276	Sedang
Gempa Bumi	98.933	Rendah
Kebakaran Hutan dan Lahan	4.768	Sedang
Kekeringan	98.933	Sedang
Letusan Gunung Api Ciremai	32.866	Rendah
Longsor	5.670	Tinggi

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa potensi bencana di Kabupaten Cirebon memiliki sebaran dan kelas bahaya yang variatif. Cuaca ekstrim menjadi salah satu ancaman bencana yang memiliki sebaran yang paling luas dan juga berada pada kelas bahaya tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim di Indonesia untuk beberapa tahun terakhir yang memang sulit untuk diprediksi. Cuaca ekstrim juga menjadi penyebab dari ancaman bahaya lain, apabila cuaca dalam kondisi hujan deras akan memungkinkan menjadi penyebab ancaman banjir yang dapat dilihat dalam Tabel 1. juga memiliki sebaran bahaya yang luas dan kelas bahayanya tinggi.



Gambar 1. Infografis Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon Tahun 2017 - 2020

Jika dikorelasikan antara Rekapitulasi Kajian Bahaya dengan Infografis Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon dapat dilihat bahwa antara kedua data tersebut saling berhubungan. Dapat diambil salah satu contoh untuk bencana banjir yang dalam data Kajian Bahaya memiliki kelas bahaya tinggi dan sebaran bahaya yang luas, hal tersebut diperkuat dengan data Infografis Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon yang memang bencana banjir mendominasi dalam kurun waktu tahun 2017-2020. Kondisi Kabupaten Cirebon jika dilihat dari Gambar 1. terkait kejadian bencana cenderung meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik secara fisik maupun *non* fisik, maka tidaklah heran jika dilihat dari tabel Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Cirebon berada pada kategori risiko tinggi seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko 2020
1	Cianjur	250.00	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	Tinggi
2	Garut	238.00	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	Tinggi
3	Tasikmalaya	224.80	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	Tinggi
4	Sukabumi	231.20	231.20	213.20	190.75	190.75	190.75	Tinggi
5	Karawang	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	Tinggi
6	Bandung	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	Tinggi
7	Kota Cirebon	183.60	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	Tinggi
8	Subang	175.80	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	Tinggi

9	Cirebon	181.20	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	Tinggi
10	Kota Banjar	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	Tinggi
11	Pangandaran	215.20	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	Tinggi
12	Majalengka	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	Sedang
13	Sumedang	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	Sedang
14	Ciamis	215.20	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	Sedang
15	Purwakarta	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	Sedang
16	Bogor	152.40	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	Sedang
17	Indramayu	175.20	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	Sedang
18	Bekasi	164.80	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	Sedang
19	Kota Bekasi	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	Sedang
20	Kuningan	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	Sedang
21	Kota Bandung	154.00	125.99	122.32	122.32	122.32	123.32	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	Sedang
23	Kota Sukabumi	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	Sedang
24	Bandung Barat	162.00	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	Sedang
25	Kota Cimahi	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	Sedang
26	Kota Depok	102.40	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	Sedang
27	Kota Bogor	107.20	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	Sedang

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penanggulangan bencana seiring dengan berjalannya waktu, mengalami perubahan paradigma, semula *responsif* menjadi *preventif* (pencegahan), sektoral menjadi multi sektoral, inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, sentralisasi menjadi desentralisasi dan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bersama. Tiga siklus dasar yang sudah pasti menjadi bagian kinerja untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon yaitu siklus pra- bencana, siklus saat bencana dan siklus pasca bencana.



Gambar 2. Siklus Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan analisis, komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penanggulangan bencana diantaranya diimplementasikan ke beberapa hal berikut:

1. Dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.
2. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon lewat fungsi pengawasan upaya pengurangan risiko bencana yang telah dijalankan dengan baik.
3. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon.

4. Dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dapat menjadi wadah masyarakat dan institusi lain untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pembentukan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).
6. Melaksanakan penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah penting dalam proses pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana adalah adanya visi dan misi untuk mengembangkan rumusan yang jelas. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon adalah “*Tervujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*”. Sedangkan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “*Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanyastabilitas nasional*”. Berdasarkan analisis, langkah strategi dan kebijakan yang ditrmph oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Cirebon

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan indeks risiko bencana	Menurunnya indeks risiko bencana	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana
		Pengurusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana
		Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana
		Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana
		Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana
		Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana
		Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana	Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana

Berdasarkan analisis, untuk mewujudkan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon menuangkan langkah operasionalnya ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon. Fokus dan prioritas program penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya pengurangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon dan Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana.

Program penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Cirebon
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon.
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Cirebon.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana



- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.
 - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Cirebon.
 - c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Cirebon.
 - d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - e. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten Cirebon.
 - f. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - g. Penanganan Pascabencana Kabupaten Cirebon.
 - h. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Cirebon.
 - i. Penyusunan Rencana Kontijensi.
 - j. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - k. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
 - b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Cirebon.
 - c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Cirebon.
 - d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Cirebon.
 - e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - f. Respon Cepat Bencana.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.
 - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Cirebon.
 - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.
 - d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan analisis, untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggalakkan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap kecamatan. Kegiatan sosialisasi tersebut juga didukung dengan dilaksanakannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut di Kabupaten Cirebon.

KESIMPULAN

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon untuk menanggulangi risiko bencana sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi perlu perbaikan dan peningkatan agar lebih optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 seperti yang dicantumkan dalam Tabel 2. Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun



2015 sampai dengan Tahun 2020. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) ini sejalan dengan fokus dan prioritas program perwujudan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon yang salah satunya untuk mengupayakan penurunan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Cirebon.

Keisapsiagaan Masyarakat terhadap bencana menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Walaupun program penanggulangan bencana yang berkaitan dengan hal tersebut sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai standar seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan dan geladi, akan tetapi program ini belum dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya siaga bencana secara menyeluruh.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon disarankan agar dapat lebih memperjelas berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana secara struktural dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dapat lebih mengoptimalkan program yang berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat, salah satu contohnya melaksanakan *study banding* dengan Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Pusat berkaitan dengan program Desa Tanggap Bencana (DESTANA) agar program tersebut dapat diterapkan di Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan Program Desa Tanggap Bencana (DESTANA) terbukti sangat efektif di Pemerintah Daerah lain untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya siaga bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon. (2021). *Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024*. Kabupaten Cirebon: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- BNPB. (2018). *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Marfuah., Cempaka, S., Ardiansyah, A. R., Rahmawati, L., Rediana, M. Y., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu dan Politik*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i1.184>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM*, 2(3), 179. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i3.69>.
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A. R., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional. *Journal of Science Education* 5(2), 180-187. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.